BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada Pemerintah Daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap Pemerintah daerahnya. Daya saing Pemerintah Daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian Pemerintah Daerah yang dapat diraih melalui adanya otonomi daerah.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi landasan yuridis bagi pengembangan Otonomi Daerah di Indonesia. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi yang baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang

accountable, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adanya pemborosan waktu kerja menjadi masalah di Dipenda dalam pengelolaan pajak daerah, dikarenakan masih menggunakan sistem manual serta penggunaan sistem yang terkomputerisasi belum digunakan secara maksimal.

Peranan sistem informasi terhadap kemajuan organisasi sudah tidak diragukan lagi. Dengan dukungan sistem informasi yang baik maka sebuah perusahaan akan memiliki berbagai keunggulan kompetitif sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lain.

Sistem Informasi Akuntansi mengacu pada PP 58 tahun 2005 dan Permendagri 13 tahun 2006 dan Permendagri 59 Tahun 2007. Sistem ini berbasis pada jaringan komputer, yang mampu menghubungkan dan mampu menangani konsolidasi data antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), sehingga data di Pemerintah Daerah dapat terintegrasi dengan baik. Sistem Informasi Akuntansi merupakan sistem akuntansi yang berbasis *relational database* dengan pola *database* tersentralisir (*centralized single database*) yang dapat diakses oleh seluruh unit.

Adapun manfaat penerapan sistem informasi akuntansi berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga

publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003).

Fenomena yang terjadi diatas menunjukkan bahwa semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan *good governance*. *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik dimana penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran.

Arus reformasi yang terjadi saat ini juga menyebabkan tuntutan yang beragam tentang pengelolaan pemerintah yang baik (*good government governance*). Tuntutan transparansi publik, kinerja yang baik dan akuntabilitas sering ditujukan kepada pemerintah daerah. Suatu sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi yang dapat dipertanggungjawabkan sangat diperlukan.

Pendapatan Pajak Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat pendapatan pajak daerah merupakan suatu bentuk peran masyarakat maka harus ada suatu pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui transparansi dan akuntabilitas pada proses administrasi dan dalam pengelolaannya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan diterapkannya Sistem Informasi Akuntansi diharapkan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan pajak daerah dapat tercapai sehingga pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan pada akhirnya dapat mengalokasikan dana yang tersedia untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Sistem Informasi Akuntansi terutama mengenai bagaimana pengaruhnya dalam administrasi Pendapatan Pajak Daerah dan bermaksud menuangkannya kedalam bentuk skripsi dengan judul:

"Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)".

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasikan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Belum efektifnya penggunaan sistem informasi akuntansi yang diterapkan.
2. Belum tercapai akuntabilitas Dinas Pendapatan Daerah terhadap pubik terutama atas pelaporan keuangannya pada hasil pendapatan pajak daerah

dikarenakan sistem pencatatan yang diterapkan masih kurang optimal sehingga transparansi dan pertanggungjawaban tidak sepenuhnya tercapai.

Adapun penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Sistem Informasi Akuntansi yang sedang berjalan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2. Bagaimana Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui seberapa besar "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi akuntansi terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah" pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penerapan Sistem Informasi Akuntansi yang sedang berjalan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Semua informasi yang dihasilkan dikumpulkan melalui penelitian dan studi literatur ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik bagi penulis sendiri, Dinas Pendapatan Daerah maupun Pihak lain.

1.4.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara praktis sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Pendapatan Kota Bandung

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan yang berguna sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang mengenai penerapan praktik Sistem informasi Akuntansi, terutama dalam sistem pencatatannya sehingga dapat menghasilkan laporan realisasi pendapatan yang akuntabel.

2. Bagi Bagian Keuangan dan Pajak

   Sebagai bahan masukan untuk bagian keuangan dan bagian pajak dalam mengevaluasi suatu administrasi keuangan yang baik dalam menerapkan Sistem Informasi Akuntansi yang akuntabel pada pendapatan pajak daerah.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara akademis sebagai berikut :

1. Bagi Pengembangan Ilmu

   Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Pemerintahan Daerah terutama mengenai Sistem Informasi Akuntansi terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah.

2. Bagi Peneliti Lain

   Dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya tentang penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam sektor publik.

3. Bagi Peneliti

   Penulis dapat memperoleh pengalaman yang berkaitan tentang penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah pengaruhnya terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah sehingga diperoleh gambaran kesesuaian fakta di lapangan dengan teori yang dipelajari.

1.5 Batasan Masalah

Untuk mengkaji suatu permasalahan yang di hadapi oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung tersebut dalam hal ini penulis membatasi permasalahan yang akan di bahas, agar pembahasan dan penyusunan dapat di lakukan secara terarah dan tercapai dengan tujuan yang di hadapkan serta untuk menghindari luasnya masalah. Maka penulis membatasi masalah yang akan di bahas yaitu:

1. Sistem Informasi akuntansi Berfokus pada sistem informasi akuntansi keuangan daerah di Dinas Pendapatan Kota Bandung.
2. Akuntabilitas yang dibahas mengenai akuntabilitas Pajak Daerah.
3. Penelitian terbatas pada Karyawan dibagian Keuangan dan bidang pendapatan pajak.

1.6. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Berdasarkan pemaparan diatas maka dibuatlah kerangka pemikiran dan hipotesis sebagai berikut:

1.6.1 Kerangka Pemikiran

Lembaga pemerintah selain berperan sebagai lembaga politik juga memiliki peran sebagai lembaga ekonomi. Lembaga pemerintah melakukan aktivitas ekonominya dengan melakukan berbagai bentuk pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya dan melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan yang digunakan untuk menutupi biaya tersebut.

Sebagai suatu lembaga yang memiliki aktivitas ekonomi, maka pemerintah memerlukan jasa akuntansi sebagai dasar informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan pemerintah atas informasi yang dihasilkan tersebut. Jasa akuntansi yang diterapkan dalam sektor pemerintahan umumnya disebut dengan akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik.

menurut Kusrini dan Andri (2007:5) Definisi sistem adalah

> “Sistem adalah kumpulan/group dari bagian/komponen apapun baik pisik maupun non pisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu”.

menurut Kusrini dan Andri (2007:7) Definisi Informasi adalah

> “data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi pengguna, yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendukung sumber informasi.

menurut jogiyanto (1999:10) Definisi sistem informasi

> “Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur- prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan yang cerdik”.

Menurut Departemen Dalam Negeri (2001:4) Sistem Akuntansi adalah:

> ”Sistem Akuntansi adalah serangkaian prosedur (mekanisme) yang digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan.”

Sedangkan menurut Kusnadi, dkk, (2002:35) Sistem Akuntansi adalah:

> ”Sistem Akuntansi adalah suatu bidang khusus akuntansi yang berhubungan dengan perancangan dan penerapan berbagai prosedur pengumpulan dan pembuatan laporan data keuangan.”

Menurut kusrini dan Andri (2007:10) Sistem Informasi Akuntansi adalah:

> ”sebuah sitem informasi yang mengubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya.

Sistem Informasi Akuntansi mempunyai tujuan mendukung operasional sehari-hari, mendukung pengambilan keputusan manajemen, memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggung jawaban.

Otonomi daerah membawa perubahan mendasar bagi penyelenggara pemerintahan serta pengelola keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pengelola keuangan berkaitan dengan persoalan perencanaan dan penggunaan dana masyarakat yang harus dilakukan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas.

Menurut Mardiasmo (2002:20) Akuntabilitas adalah:

> ”Kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Berdasarkan pengertian akuntabilitas diatas maka akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Menurut Ellwood yang dikuti oleh **Mardiasmo (2002:21)**, menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik/pemerintahan, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum (*accountability for probity and llegality*)
2. Akuntabilitas proses (*proccess accountability*)
3. Akuntabilitas program (*program accountability*)
4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Berdasarkan empat dimensi akuntabilitas, diuraikan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*)

   Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*).

2. Akuntabilitas proses (*proccess accountability*)

   Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas program (*program accountability*)

   Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

   Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Seperti halnya dengan pemerintah pusat yang menarik pajak untuk membiayai kegiatannya, maka pemerintah daerah juga menarik pajak sebagai sumber pendapatan dan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, disamping sumber-sumber pendapatan lainnya.

Menurut Indra Bastian (2007:146) Pendapatan adalah:

> ”Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lain atas harta dari satu kesatuan atau penyelesaian kewajibannya selama satu periode dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi pokok atau utama yang berkelanjutan dari kesatuan tersebut.”

Menurut Mardiasmo (2003:98) menyatakan bahwa pajak daerah adalah:

> ”Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Sedangkan pengertian Akuntabilitas Pendapatan pajak Daerah itu sendiri menurut Abdul Halim (2004:52) adalah:

> ”Kewajiban untuk memberikan tanggung jawab dalam menyajikan/melaporkan informasi realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah kepada yang berwenang.”

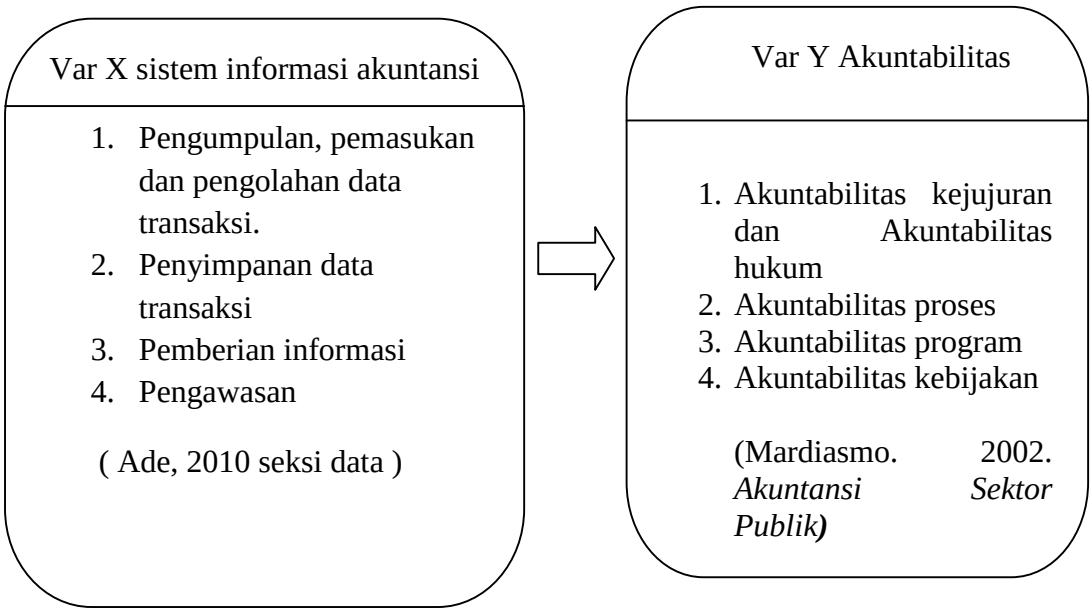
Oleh karena pajak daerah merupakan suatu bentuk peran serta masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan dan pembangunan daerah maka pemerintah daerah harus menggunakan uang pajak tersebut untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan masyarakat tahu bahwa uang tersebut tidak diselewengkan penggunaannya, sehingga pemerintah dituntut akuntabilitasnya. Untuk dapat menyusun laporan realisasi penerimaan pajak daerah, maka pemerintah memerlukan jasa akuntansi agar dapat meningkatkan mutu dalam pengawasan dan informasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan pajak daerah yang kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi serta pemerintah daerah dapat menunjukkan pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini yaitu pendapatan pajak daerah yang akuntabel kepada publik.

Dari penjelasan diatas maka sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut:

Tabel 1.1

Skema Kerangka Pemikiran



Komponen sistem informasi Akuntansi

1. Brainware, orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut
2. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terkomputerisasi, yang dilibatkan dalam pengumpulan, pemrosesan dan penyimpanan data aktivitas-aktivitas organisasi
3. Data tentang proses-proses bisnis
4. Software yang dipakai untuk memproses data organiasasi
5. Infrastruktur teknologi informasi.

Adapun teori penghubing yang menghubungkan variable X dan Y dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

Buruknya sistem akuntansi merupakan salah satu faktor penyebab tidak dapat diperolehnya informasi yang handal dan dapat dipercaya untuk dipergunakan dalam penerapan akuntabilitas secara penuh. Akuntabilitas memerlukan dukungan sistem informasi akuntansi yang memadai untuk terselenggaranya pelaporan yang baik.

Jurnal Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Akuntabilitas **(**Posted on Oktober 10, 2008 by Pakde sofa

Teori Penghubung X dan Y

1.6.2. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diberikan peneliti yang diungkapkan dalam pernyataan yang dapat diteliti. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diungkapkan diatas penulis memberikan hipotesis sebagai berikut :

” Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah.”

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada kantor Dinas Pendapatan Kota Bandung yang berlokasi di Jl. Wastukencana No. 2 Bandung. Adapun Waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan pebruari sampai dengan juni 2010. Berikut ini tabel waktu penelitian:

Tabel 1.2

Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan																			
		Maret'10				April '10				Mei '10				Juni '10				Juli'10			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Presurvei: a. Persiapan judul skripsi																				
	b. Persiapan teori pendukung judul skripsi																				
	c. Pengajuan judul skripsi																				
	d. Cari perusahaan																				
2.	Proses Usulan (UP bab 1-3) Penelitan: a. Penulisan UP																				
	b. Bimbingan UP																				
	c. seminar UP																				
	d. Revisi UP																				
3.	Penyusunan Skripsi: a. Pengumpulan data																				
	b. Pengolahan dan Analisis Data																				
	c. Bimbingan & Penulisan Skripsi																				
	d. Sidang Skripsi																				
	e. Revisi Sidang																				